

Pancasila sebagai sistem etika: landasan pendidikan karakter, kebijakan publik, dan kontribusi global

Moh Zaki Aulia Hakim

Program studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *mohzakiulia@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, sistem etika, pendidikan karakter, krisis moral, kebijakan publik.

Keywords:

Pancasila, Ethical System, Character Education, Moral Crisis, Public Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Pancasila sebagai sistem etika dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila membentuk kerangka etika yang komprehensif, mencakup dimensi spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan, Pancasila berperan sebagai landasan pembentukan karakter generasi muda yang religius, berakhlak mulia, mandiri, dan demokratis. Namun, di era

globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan serius berupa krisis moral, degradasi identitas, dan polarisasi sosial. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat mendesak, baik dalam pendidikan formal, kebijakan publik, maupun kehidupan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki relevansi universal, tidak hanya sebagai perekat bangsa, tetapi juga sebagai kontribusi Indonesia bagi peradaban dunia

ABSTRACT

This study examines Pancasila as an ethical system in shaping the character of the Indonesian nation. Pancasila is not merely a political ideology but also a moral compass that guides the behavior of society in national and civic life. The values embedded in each principle of Pancasila form a comprehensive ethical framework, encompassing spirituality, humanity, unity, democracy, and social justice. In the context of education, Pancasila serves as the foundation for developing young generations who are religious, virtuous, independent, and democratic. However, in the era of globalization and digitalization, Pancasila's values face serious challenges such as moral crises, identity degradation, and social polarization. Therefore, the internalization of Pancasila's values is urgently needed in formal education, public policy, and social life. This study emphasizes that Pancasila has universal relevance, functioning not only as a unifying force for the nation but also as Indonesia's contribution to global civilization



Pendahuluan

Pancasila sebagai landasan negara Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak disusun oleh pendiri negeri, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai konsep politik, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menyangkut aspek etika, moral, dan spiritual. Prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup yang perlu diterapkan dalam keseharian, baik oleh individu maupun masyarakat secara bersama. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar lambing konstitusi, tetapi juga dasar etis yang Menyusun karakter bangsa. Secara historis, Pancasila muncul dari perjuangan Panjang bangsa Indonesia dalam mencari fondasi negara yang dapat menyatukan berbagai perbedaan etnis, agama, serta tradisi budaya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila Adalah hasil penyaringan dari kearifan local, tradisi keagamaan, dan sejarah bangsa. Dengan demikian, Pancasila memiliki legitimasi moral yang kuat sebagai system etika yang bisa dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa.

Dalam dunia pendidikan, Pancasila memainkan fungsi penting sebagai pijakan dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan karakter harus terintegrasikan dalam seluruh tahap pembelajaran, sehingga dapat melahirkan kelulusan yang memiliki sifat religious, bersifat baik, mandiri, serta berjiwa demokratis (Mujtahid, 2016). Pendapat ini selaras dengan pandangan bahwa pembelajaran yang berlandaskan Pancasila dapat membentuk kepribadian yang religious, social, demokratis, serta disiplin (Aryani et al., 2022). Dengan demikian pendidikan karakter yang berdasarkan Pancasila tidak hanya focus paada pengembangan focus intelektual, tetapi juga pada pembentukan integritas moral yang sangat penting untuk menghadapi tantangan masa kini. Namun, dalam era globalisasi, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat. Arus budaya digital global sering kali menyebabkan krisis identitas dan penurunan moral di kalangan remaja. Kesenjangan dalam komunikasi antar generasi, yang membuat pemahaman terhadap kegunaan Pancasila berbeda-beda (Febri et al., 2025). Di sisi lain, Indonesia tengah menghadapi krisis moral dan etika, yang ditandai dengan semakin banyaknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja. Situasi ini menunjukkan bahwa pentingnya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika semakin mendesak, tidak hanya dalam pendidikan formal, tetapi juga dalam kehidupan sosial serta kebijakan public (Nursyam & Nurfadhilah, 2023).

Selain itu, Pancasila juga memiliki makna filosofis yang dalam. Pancasila adalah bagian dari filsafat yang dijelaskan melalui setiap sila untuk mengatur cara hidup masyarakat (Airin, Mainar, Awellya, 2024). Sistem nilai Pancasila juga bisa menjadi cara berpikir rasional untuk mengatasi berbagai masalah negara (Aini & Dewi, 2022). Memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah langkah penting untuk menjaga ketahanan bangsa di tengah perubahan zaman (Atqiya et al., 2024). Dengan kata lain, Pancasila tidak hanya penting bagi kepentingan nasional, tetapi juga memiliki nilai yang universal yang bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Hilangnya karakter berarti hilangnya semuanya, sehingga karakter harus menjadi dasar utama dalam proses Pembangunan (Rahardjo, 2017). Menurunnya nilai-nilai Pancasila karena dampak modernisasi bisa diatasi dengan

membangun karakter bangsa yang kuat dan terus menerus terpahami nilai-nilai Pancasila (Amalia & Najicha, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya jawaban atas krisis moral, tetapi juga merupakan strategi dalam membentuk bangsa yang berintegritas dan mampu bersaing. Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa Pancasila sebagai sistem etika memiliki relevansi yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa. Ia bukan hanya ideologi politik, melainkan juga pedoman moral yang mampu menjawab tantangan globalisasi, krisis moral, dan polarisasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana Pancasila sebagai sistem etika dapat diinternalisasikan dalam pendidikan karakter dan kehidupan berbangsa, sehingga tetap relevan di era modern dan mampu menjadi perekat bangsa di tengah dinamika global.

Pembahasan

Pancasila sebagai sistem etika dan fondasi moral bangsa

Pancasila bukan hanya sekumpulan sila yang terpisah, melainkan sebuah sistem nilai yang saling mendukung dan membentuk arah moral bangsa. Sebagai sistem etika, Pancasila membimbing bagaimana kita menilai sesuatu sebagai benar atau salah, adil atau tidak adil, serta layak atau tidak layak dalam hidup bersama. Di dalam sila pertama, dimensi spiritual menghubungkan moralitas dengan kesadaran yang melampaui diri sendiri, sementara sila kedua menekankan pentingnya martabat manusia yang harus dihargai dalam setiap kebijakan dan tindakan. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi pedoman moral yang bekerja di tingkat individu, komunitas, dan pemerintahan. Kekuatan Pancasila sebagai sistem etika terletak pada keseimbangannya. Ia menerima nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi berdasarkan musyawarah, serta keadilan sosial, tanpa mengutamakan salah satunya. Keseimbangan ini membuat Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip melindungi martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan secara utuh, keputusan etis tidak akan mengejar efisiensi dengan mengorbankan kelompok yang lemah, serta tidak akan memaksakan keseragaman atas nama persatuan.

Berbeda dengan etika yang hanya berdasarkan logika atau tujuan, Pancasila menggunakan nilai-nilai dari budaya dan agama sebagai dasar kebijaksanaan bersama. Dengan prinsip ini, Pancasila menciptakan ruang untuk berdiskusi antar kelompok, bukan hanya tentang siapa yang menang. Di sini, keadilan sosial menjadi bagian utama dari etika Pancasila: keputusan terbaik bukan hanya yang paling efektif, tetapi juga yang paling adil bagi seluruh rakyat. Sebagai dasar pemikiran, Pancasila memberikan posisi moral yang jelas bagi bangsa: menghormati sesuatu yang suci, melindungi yang lemah, menggabungkan yang berbeda, berdiskusi untuk menyelesaikan perdebatan, serta mendistribusikan hasil pembangunan secara merata. Kerangka ini bukan hanya aturan, tetapi arah tindakan yang memandu budaya dalam pemerintahan, pendidikan, dan ruang publik. Sejalan dengan itu, Airin Syafira dkk. menegaskan, "Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat berbangsa, dan bernegara di Indonesia" (Airin et al., 2024). Aini & Dewi

menambahkan, “Sistem etika Pancasila memiliki konsep yang dijadikan sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah yang mengakar di Indonesia secara rasional” (Aini & Dewi, 2022).

Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Urgensi Pancasila sebagai sistem etika terasa dari perannya sebagai dasar moral yang memandu tindakan individu, masyarakat, dan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan untuk menghadapi perubahan sosial, krisis moral, serta dampak dari globalisasi, sebagaimana ditegaskan bahwa “Pancasila merupakan fondasi moral dan filosofis yang mendasari negara Indonesia” (Tuddur et al., 2024). Karena posisinya sebagai sumber nilai, Pancasila berperan sebagai penjaga terhadap pengaruh budaya dari luar, perkembangan teknologi, serta tantangan dari era modern yang bisa merusak identitas dan karakter bangsa jika tidak didukung oleh pedoman etika yang kuat.

Selain itu, pentingnya Pancasila juga terlihat dari kemampuannya untuk menjaga persatuan bangsa yang beragam melalui nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Di tengah keragaman suku, agama, budaya, serta meningkatnya perpecahan sosial, Pancasila memberikan arah bagaimana membangun harmoni dan toleransi, sebagaimana dijelaskan bahwa Pancasila menjadi “panduan moral yang menjaga harmoni dan toleransi dalam masyarakat yang beragam” (Tuddur et al., 2024). Fungsi ini membuat Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga kebutuhan penting untuk memperkuat kestabilan sosial, menggabungkan perbedaan, serta memastikan bahwa pembangunan negara berlangsung dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Pancasila dalam pendidikan karakter

Pendidikan karakter berdasarkan Pancasila tidak hanya menambahkan nilai-nilai ke dalam kurikulum, tetapi juga mengubah tujuan pendidikan secara utuh: dari hanya memberi pengetahuan menjadi membentuk manusia yang bermartabat. Cara yang efektif adalah dengan menggabungkan nilai Pancasila dalam desain pembelajaran, budaya sekolah/kampus, penilaian perilaku, dan teladan guru/dosen. Dengan demikian, mahasiswa dan siswa tidak hanya mengerti konsep nilai, tetapi juga merasakan langsung akibat etis dari nilai-nilai tersebut dalam interaksi akademik dan sosial. Penguatan pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila sangat penting terutama di masa kini yang semakin terhubung secara digital. Di masa ini, godaan seperti plagiarisme, penyebaran informasi yang salah, dan perpecahan antar kelompok mudah mengganggu proses belajar. Institusi pendidikan harus menciptakan lingkungan pengevaluasian yang menghargai proses dan nilai etis, bukan hanya hasil akademik. Contohnya, memberikan penghargaan bagi proyek kerja sama yang menerapkan sikap musyawarah, atau menyusun kriteria penilaian yang mencakup rasa peduli terhadap sesama dan integritas seseorang. Dengan alat-alat seperti ini, pendidikan karakter bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi kebiasaan yang terus diperkuat.

Konsistensi antara nilai yang diajarkan dan cara berperilaku di dalam institusi adalah hal yang paling penting. Ketika para guru, dosen, dan pemimpin mencontohkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, para siswa dan mahasiswa akan mengerti pesan etis melalui tindakan nyata mereka. Mujtahid menulis, “Pendidikan nasional

mendorong terwujudnya generasi penerus bangsa yang memiliki karakter religius, berakhlak mulia, cendekia, mandiri, dan demokratis” (Mujtahid, 2016). Aryani dkk. menegaskan, “Pembelajaran kepribadian berbasis Pancasila... religius, hirau sosial, kemandirian, semangat nasional, demokrasi, toleransi, dan disiplin” (Aryani et al., 2022). Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika tidak hanya memperkuat fondasi moral bangsa, tetapi juga menjadi dasar utama dalam pembentukan karakter peserta didik agar memiliki integritas, sikap kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial (Nurizka, 2020).

Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi

Globalisasi mempercepat pertukaran gagasan, gaya hidup, dan teknologi, yang sering kali menciptakan perbedaan antara nilai lokal dan tren global. Di tengah arus yang cepat ini, Pancasila berfungsi sebagai pengawas etika: menyerap hal-hal yang bermanfaat, menolak hal yang merusak martabat, serta mengubah perbedaan menjadi dialog. Nilai persatuan Indonesia mengingatkan bahwa hubungan global tidak boleh menghilangkan identitas bangsa, sementara nilai kemanusiaan mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus tetap berpihak kepada manusia. Ruang digital memberi ruang lebih lebar untuk berekspresi, tetapi jika tidak diimbangi dengan etika, maka bisa berubah menjadi tempat berita palsu, ujaran kebencian, dan penyerangan terhadap pribadi. Pancasila menetapkan standar beradab: informasi yang jujur, penghormatan terhadap martabat, dan tanggung jawab sosial. Diskusi terbuka secara digital yang didasari oleh bukti jelas dan ketersediaan untuk saling memperbaiki adalah bentuk nyata penerapan sila keempat Pancasila dalam dunia media sosial dan platform kerja sama.

Di tingkat kebijakan, etika Pancasila mendorong pengelolaan data yang adil: transparan, melindungi privasi, serta menghindari diskriminasi dari algoritma. Keadilan sosial di dunia digital berarti memberi akses yang sama terhadap pengetahuan, perangkat, dan peluang ekonomi baru. Dengan perspektif ini, transformasi digital bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga keterlibatan yang merata. Kesenjangan antara generasi muda yang menggunakan teknologi secara alami dan orang tua yang lebih berakar pada tradisi perlu diatasi dengan pendekatan berdasarkan etika dialog Pancasila. Persatuan tidak berarti semua orang harus setuju, tetapi bersedia bertemu di tengah jalan untuk saling memahami. Menerapkan pendidikan umum tentang literasi digital yang sopan adalah langkah nyata untuk membawa nilai-nilai Pancasila ke dalam ruang yang paling aktif dalam kehidupan modern. Jika krisis identitas muncul di tengah datangnya berbagai konten global, Pancasila membimbing agar rasa bangga pada lokal tidak membuat seseorang tertutup, namun juga tidak mengikuti tanpa memilih dan memfilter. Putri dkk. menulis, “Perubahan sosial yang cepat, budaya digital global, gap komunikasi antar generasi, dan perbedaan pemahaman terhadap relevansi Pancasila” (Febri et al., 2025). Nursyam & Nurfadhilah menegaskan, “Indonesia sedang mengalami krisis moral dan etika, banyak pelaku masih di bawah umur” (Nursyam & Nurfadhilah, 2023). Dua kutipan ini menguatkan urgensi etika Pancasila sebagai penuntun bermedia dan berinteraksi lintas budaya.

Pancasila sebagai perekat bangsa dan solusi krisis moral

Keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat adalah kekayaan Indonesia, tetapi juga tantangan dalam bersatu secara etis. Pancasila mengelola keberagaman tersebut dengan prinsip kemanusiaan dan persatuan: perbedaan dihormati, tujuan bersama ditegaskan, dan konflik diatasi melalui musyawarah. Saat ada ketegangan sosial, nilai keadilan sosial mengingatkan agar kebijakan tidak hanya mengikuti suara yang paling keras, tetapi memperhatikan martabat semua pihak. Krisis moral seperti korupsi, kekerasan, dan diskriminasi tidak bisa selesai hanya dengan aturan saja; ia membutuhkan budaya etik yang hidup. Pancasila memberikan kerangka untuk membangun budaya tersebut: contoh yang baik dari pemimpin, kekonsistenan dalam penerapan hukum, serta pendidikan karakter yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, komunitas lokal yang kuat memegang nilai gotong royong menjadi benteng sosial yang mencegah konflik dan meningkatkan rasa peduli.

Musyawarah sebagai prinsip demokrasi dalam Pancasila membantu memulihkan cara berdebat: bukan dengan memojokkan pihak lawan, tetapi mencari kebijakan yang terbaik bagi semua pihak. Di sini, kebijaksanaan (hikmat) menjadi kompetensi etis yang harus dilatih: memahami data, konteks budaya, serta menyelaraskan kepentingan jangka pendek dengan visi jangka panjang. Dengan demikian, keputusan tidak hanya legal, tetapi juga adil dan bisa menenangkan. Perekat bangsa tidak hanya bekerja di tingkat simbolik seperti bendera dan lagu, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, cara media menyampaikan berita, cara sekolah mengajar, dan cara pemerintah melayani masyarakat. Setiap institusi yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mempertahankan persatuan tanpa menghilangkan perbedaan, sebenarnya sedang membantu memupuk budaya Pancasila. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh isu, karena memiliki dasar kepercayaan sosial yang kokoh. Dalam masa krisis, kita membutuhkan bahasa nilai yang bisa dipahami oleh semua orang. Atqiya dkk. menulis, “Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia dipandang sebagai jalan tengah untuk mengatasi polarisasi sosial” (Atqiya et al., 2024). Manggala & Badrudin menambahkan, “Konsep keadilan dalam Islam dan Pancasila memiliki titik temu dalam prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial” (Badrudin & Manggala 2024). Perangin-angin dkk. menegaskan, “Pancasila mampu menjadi solusi atas krisis moral yang melanda masyarakat” (Perangin-angin et al., 2025). Tiga kutipan ini memperkuat bahwa Pancasila bukan hanya wacana, melainkan terapi etis bagi luka sosial kita.

Pancasila dalam kebijakan publik dan kontribusi global

Etika Pancasila dalam kebijakan publik dimulai dari penentuan tujuan, yaitu melindungi seluruh bangsa dan wilayah tumpah darah, meningkatkan kesejahteraan umum, mendorong kemajuan kehidupan, serta mengajak partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai dasar penilaian apakah suatu kebijakan mampu meningkatkan martabat, memperkuat persatuan, menerapkan musyawarah yang terbuka, serta membagi hasil pembangunan secara adil. Kebijakan dinilai sukses bukan hanya karena pencapaian ekonomi, tetapi juga karena kualitas keadilan dan rasa persatuan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, kebijakan yang sesuai dengan Pancasila mampu meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi

pembelajaran. Akses memastikan semua anak mendapatkan kesempatan belajar tanpa terkecuali; kualitas memastikan proses belajar tidak hanya menekankan pada pengetahuan, tetapi juga karakter; relevansi memastikan lulusan mampu hidup dengan baik sebagai warga negara yang beradab di tengah kemajuan teknologi digital. Di bidang ekonomi, nilai keadilan sosial mendorong penerapan pajak yang bertahap, sistem jaring pengaman sosial, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah agar pertumbuhan ekonomi bisa merata dan tidak hanya berada di tangan sebagian orang.

Kepemimpinan pemerintahan yang berlandaskan etika Pancasila menekankan transparansi, tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat. Musyawarah diwujudkan melalui dialog dengan publik, evaluasi kebijakan berdasarkan data, serta mekanisme perbaikan yang terbuka. Nilai persatuan dan kemanusiaan mendorong pelayanan publik yang inklusif, seperti bisa diakses oleh penyandang disabilitas, ramah terhadap perbedaan gender, serta memperhatikan kebutuhan komunitas adat. Dengan demikian, etika bukan sekadar hiasan, tetapi bagian dari cara kerja sehari-hari lembaga pemerintah. Kontribusi global Pancasila terlihat dalam cara Indonesia berdiplomasi nilai, yaitu dengan menawarkan model kebangsaan yang menghormati keberagaman sekaligus menerapkan keadilan sosial. Dalam forum internasional, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar dari sikap Indonesia terhadap perdamaian, kerja sama, dan pembangunan yang tidak mengabaikan negara-negara kecil. Dengan etika ini, Indonesia bukan hanya menerima arahan global, tetapi juga memberi saran praktis yang seimbang antara kemajuan dan martabat manusia.

Akhirnya, nilai-nilai Pancasila mengajak setiap kebijakan untuk menjawab pertanyaan etis seperti: siapa yang untung, siapa yang terluka, apakah prosesnya adil, apakah hasilnya mampu mempersatukan? Jawaban yang sesuai dengan nilai Pancasila akan mengarahkan negara menuju arah yang lebih beradab. Sihotang menulis, "Pancasila harus diinternalisasikan dalam kebijakan publik agar menghasilkan masyarakat yang berintegritas" (Sihotang, 2024). Maulida & Oktavia menegaskan, "Pendidikan Pancasila harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional" (Maulida & Oktavia, 2025). Dua kutipan ini menguatkan bahwa kebijakan yang baik bukan hanya cerdas, tetapi juga berkarakter.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran penting dalam membentuk karakter rakyat Indonesia. Ia bukan hanya panduan politik, tetapi juga aturan moral yang mengarahkan cara hidup masyarakat sehari-hari. Setiap nilai dalam sila Pancasila membentuk kerangka etika yang luas, yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus menjaga identitas bangsa. Dalam pendidikan, Pancasila menjadi dasar dalam membentuk karakter generasi muda, tidak hanya meningkatkan kecerdasan berpikir, tetapi juga membangun integritas moral. Pendidikan karakter berdasarkan Pancasila seperti benteng moral yang menjaga bangsa dari krisis identitas di tengah era globalisasi. Namun, di tengah perkembangan digital, nilai-nilai Pancasila mengalami tantangan besar berupa masalah moral, hilangnya identitas, dan munculnya perpecahan sosial. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat, baik dalam pendidikan formal, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kebijakan pemerintah.

Sebagai langkah lanjutan, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus menjadi inti utama dalam kurikulum, dengan nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Revitalisasi nilai Pancasila di era digital juga perlu dilakukan dengan menerapkan etika kejujuran dan persatuan dalam penggunaan media sosial. Di bidang kebijakan publik, Pancasila harus dijadikan dasar agar masyarakat yang dihasilkan menjadi berintegritas, transparan, serta adil. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai ikat pinggang bangsa yang mampu mengatasi perpecahan sosial dengan menekankan nilai kemanusiaan dan persatuan. Lebih lanjut, Pancasila memiliki makna universal yang bisa menjadi kontribusi Indonesia untuk dunia, terutama dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, serta demokrasi. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia, tetapi juga relevan sebagai pedoman moral dunia.

Daftar Pustaka

- Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022). *Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. 6, 11120–11125.
- Airin, Mainar, Awellya, E. (2024). *Pancasila sebagai sistem etika*. 3(4), 5012–5015.
- Amalia, Fi., & Najicha, F. U. (2023). *JURNAL GLOBAL CITIZEN*. 1.
- Aryani, E. D., Fadrijin, N., & Azzahro, T. A. (2022). *IMPLEMENTASI NILAI- NILAI PANCASILA DALAM*. 9(20).
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Ummu, R. P., Natasyah, R. U., & Darrohmah, S. A. (2024). *Pancasila Sebagai Sistem Etika , Etika Kehidupan Berbangsa , dan Perlunya Pancasila sebagai Sistem Etika Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret , Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas*.
- Febri, V., Putri, A., Pratiwi, I. H., Hidayatullah, A. D., Malik, M., Malang, I., Timur, J., & Kunci, K. (2025). *Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi : Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi*. 3. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/7/24556.pdf>
- Manggala, K., & Badruddin. (2024). *Al-Masail : Journal of Islamic Studies THE CONCEPT OF JUSTICE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAM AND PANCASILA* Kayan Manggala , Badruddin Magister Studi Islam , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Indonesia *PENDAHULUAN Kehidupan manusia klasik dan m*. 2(2), 90–99. <https://repository.uin-malang.ac.id/22294/1/22294.pdf>
- Maulida, M., & Oktavia, N. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Pendidikan Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Bangsa Yang Berintegritas Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1(2012), 83–87.
- Mujtahid. (n.d.). *MODEL IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDEKATAN TERINTEGRASI DALAM PERKULIAHAN PADA JURUSAN PAI-FITK UIN*. 17(2), 230–252. <https://repository.uin-malang.ac.id/1328/2/1328.pdf>
- Nurizka, R. (2020). *INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBENTUK*

KARAKTER SISWA MELALUI BUDAYA SEKOLAH. 7, 38–49.

Nursyam, N. A., & Nurfadhilah, T. M. (2023). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Manusia Yang Berkarakter*. 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.20956/lexprudentium7i2.xxxx>

Perangin-angin, D. S. B., Masniar, Pangaribuan, F., Manik, S. M., Yunata, S., & Dharma, S. (2025). *No Title*. 10.

Rahardjo, M. (2017). *Penguatan Karakter dan Nilai-nilai Budaya Bangsa Wealth , Health and Character*.

Sihotang, S. E. (2024). *Journal of social, justice and policy*. 3(3), 7–12.

Tuddur, S., Wulandari, V., Amelia, S., Murniati, Y., Arifin, K., & Trisno, B. (2024). *Konsep dan urgensi pancasila sebagai sistem etika*. 2(3).